

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Barang dan jasa yang menjadi indikator dalam PDB merupakan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen terakhir. Kemudian harga pasar tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, faktor-faktor produksi yang berlokasi di negara yang bersangkutan dalam perhitungan PDB tidak mempertimbangkan asal faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan *output*.²² Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Syahbudi dan Ripai dalam penelitian nya yang berbunyi:

Berdasarkan metode pendekatan produksi, pendapatan nasional adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam periode tertentu. Dengan metode ini, pendapatannasional dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai tambah (*value added*) proses produksi di dalam masyarakat (warga Negara asing dan penduduk) dari berbagai lapangan usaha suatu Negara dalam kurun waktu satu priode (biasanya satu tahun).²³

Sehingga dapat diartikan PDB sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari Produk Nasional Bruto (PNB) karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara

²² Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal. 224

²³ Muhammad Syahbudi dan Ahmad Ripai Saragih, “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Laporan Penelitian Mandiri di Publikasi UIN Sumatra Utara*, 2018. hal, 17.

tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. Secara kasar PDB dapat dijadikan ukuran kesejahteraan ekonomi suatu negara, akan tetapi ukuran ini tidak terlalu tepat. Mengapa dikatakan tidak tepat karena jika hanya melihat PDB, perhitungan tersebut masih mengabaikan faktor jumlah penduduk. Dalam menghitung Produk Domestik Bruto terdapat tiga cara yang dapat digunakan, yaitu:²⁴

1. Metode Output (*output Approach*) atau Metode Produksi

Berdasarkan metode Output, PDB merupakan total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan cara membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Dalam perhitungan PDB dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara.²⁵

$$NT = NO - NI$$

Keterangan:

NT = Nilai Tambah

NO = Nilai *Output*

NI = Nilai *Input*

Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan $NT > 0$.

Dengan demikian, persamaan PDB adalah:

²⁴ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi...*, hal. 229

²⁵ *Ibid*, hal. 230.

$$PDB = \sum_{i=1}^n NT$$

Keterangan:

n = sektor produksi ke 1,2,3,...,n

2. Metode Pendapatan (*Income Approach*)

Berdasarkan metode pendapatan ini memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi seperti di bawah ini:

$$Q = f(L, K, U, E)$$

Keterangan:

Q = *Output*

L = Tenaga Kerja

K = Barang Modal

U = Uang/*Finance*

E = Kemampuan Kewirausahaan

Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang / aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN)

$$PN = w + i + r + \pi$$

Keterangan:

w = Upah

i = Bunga

r = sewa

π = Keuntungan

3. Metode Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Berdasarkan metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian:

- a. Konsumsi Rumah Tangga
- b. Konsumsi Pemerintah
- c. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
- d. Ekspor Neto (*Net Export*)

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:²⁶

$$PDB = C + G + I + (X-M)$$

Keterangan:

C = Konsumsi rumah tangga

G = Pengeluaran pemerintah

I = Income

X = Ekspor

M = Import

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. PDB ini merupakan sebuah pendapatan yang

²⁶ *Ibid* ..., hal. 231-234.

didapatkan dari hasil produksi dalam satu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Tingkat PDB dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan karena dengan peningkatan PDB menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara tengah mengalami peningkatan sehingga kegiatan usaha masyarakat juga mengalami peningkatan yang berakhir pada investasi yang semakin tinggi dan kebutuhan modal yang bertambah. Sehingga berimplikasi pada kebutuhan dana masyarakat yang juga akan meningkat.²⁷

B. Nilai Tukar (Kurs Valuta Asing)

Nilai tukar dapat diartikan sebagai harga suatu mata uang asing atau harga mata uang luar negeri terhadap mata uang domestik. Pertukaran antara mata uang yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs (*exchange rate*).²⁸ Adiwarman Karim menjelaskan bahwa:

Exchange Rates atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik atau resiprokal yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.²⁹

Ini berarti bahwa nilai tukar uang merupakan kemampuan sebuah uang domestik untuk disejajarkan dengan mata uang asing sehingga memiliki sifat nilai yang sama. Kegunaan nilai tukar ini agar suatu mata uang domestik memiliki sifat yang sama dengan mata uang asing dan dapat digunakan sebagai sebuah alat transaksi yang sah dan diakui. Nilai tukar sebuah mata uang dapat ditentukan

²⁷ Muhammad Syahbudi dan Ahmad Ripai Saragih, “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Laporan Penelitian Mandiri di Publikasi UIN Sumatra Utara*, 2018. hal, 6.

²⁸ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal 289.

²⁹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 157.

berdasarkan beberapa hal antara lain kebijakan pemerintah, kesepakatan antar negara atau bahkan dari hasil mekanisme permintaan dan penawaran. Namun utamanya sebuah nilai tukar disebabkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran sebuah mata uang.

Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Nilai tukar juga merupakan perbandingan antara mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs yang menunjukkan bahwa US\$ 1.00 sama dengan Rp 8,400 berarti untuk memperoleh satu dolar Amerika Serikat dibutuhkan 8,400 rupiah Indonesia. Kurs valuta asing di antara dua negara seringkali berbeda di antara satu masa dengan masa yang lainnya.³⁰

1. Penentuan Nilai Kurs

Perubahan pada nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua yaitu depresiasi dan apresiasi. Dalam sistem perekonomian makro bila terjadi kenaikan nilai tukar berarti terdapat supply dalam jumlah yang lebih besar dari periode sebelumnya. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing, sedangkan apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Bila kondisi lain tetap (*ceteris paribus*), maka depresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang negara tersebut lebih murah bagi pihak luar negeri sedangkan harga barang luar negeri menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri. Dan sebaliknya, apresiasi mata uang suatu negara menyebabkan

³⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2012), hal. 397

harga barang Negara tersebut menjadi mahal bagi pihak luar negeri sedangkan harga barang luar negeri menjadi lebih murah bagi pihak dalam negeri.³¹ Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi rendahnya nilai tukar valuta asing:³²

a. Kurs Tetap (*Fixed exchange rate*)

Kurs tetap merupakan sistem penentuan nilai mata uang asing di mana bank sentral menetapkan harga berbagai mata uang asing tersebut dan harga tersebut tidak diubah dalam jangka waktu yang lama. Dalam sistem kurs tetap, pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang dalam negeri secara tetap terhadap nilai tukar mata uang lain. Dengan demikian, pada kurs yang ditetapkan perbedaan permintaan dan penawaran tidak seimbang.³³

b. Kurs Bebas (*Floating exchange rate*)

Sistem kurs fleksibel merupakan nilai mata uang asing yang ditetapkan berdasarkan perubahan permintaan dan penawaran di pasaran valuta asing dari hari ke hari. Kurs uang dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran di bursa-bursa internasional. Dengan demikian, jumlah uang beredar dan tingkat harga dalam negeri lebih dapat dikendalikan.

c. Kurs Distabilkan (*Managed Floating*)

Merupakan kurs yang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dengan perbandingan tertentu terhadap dollar atau valuta lainnya. Kurs dibiarkan mengambang (*floating*) dulu, dengan maksud agar melalui proses

³¹ *Ibid...*, hal. 398.

³² T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2004), hal. 300-303.

³³ Sadono Sukirno, *Op.cit...*, hal. 197.

permintaan dan penawaran di pasar bebas tercapai kurs yang lebih realistis, setelah itu ditetapkan lagi kurs yang resmi.

2. Sistem Nilai Tukar

Nilai tukar suatu mata uang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar, yaitu:³⁴

a. *Floating Exchange Rate System* (Sistem Nilai Tukar Mengambang)

Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terdapat di pasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran di atas permintaan, dan sebaliknya nilai tukar akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan di atas penawaran yang ada pada pasar valuta asing. Semakin terbuka perekonomian suatu negara yang disertai dengan sistem nilai tukar mengambang dan sistem devisa bebas, maka semakin besar pengaruh nilai tukar dan aliran dana luar negeri terhadap perekonomian dalam negeri.

b. *Fixed Exchange Rate System* (Sistem Nilai Tukar Tetap)

Pada sistem ini, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika adalah Rp 8000 per dolar. Pada nilai tukar ini bank sentral akan siap untuk menjual dan membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Apabila nilai tukar tersebut

³⁴ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), hal. 48.

tidak dapat dipertahankan, maka bank sentral dapat melakukan devaluasi atau revaluasi nilai tukar yang ditetapkan.

c. *Managed Floating Exchange Rate System* (Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali)

Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut *intervention bond* batas pita intervensi.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, nilai tukar merupakan sebuah nilai dari mata uang domestik terhadap mata uang asing. Adanya nilai tukar ini sebagai pengakuan sebuah mata uang domestik terhadap mata uang asing agar dapat digunakan bertransaksi di negara asing. Kedua, penetapan nilai tukar sebuah mata uang dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain penetapan pemerintahan, kesepakatan antar negara dan juga bisa berasal dari hasil mekanisme permintaan dan penawaran sebuah mata uang. Ketiga, terdapat tiga sistem nilai tukar yang umumnya diakui oleh sebuah negara yakni sistem nilai tukar mengambang yang didasarkan oleh aktivitas penawaran dan permintaan sebuah mata uang, sistem nilai tukar tetap yang merupakan hasil kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga mata uangnya terhadap mata uang lainnya, dan yang terakhir yakni mengambang terkendali dimana nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil mekanisme pasar uang.

Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar mengindikasikan bahwa perekonomian telah mengalami perubahan. Jika rupiah mengalami apresiasi mengindikasikan bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan, sedangkan

ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka dapat mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami kelesuan atau perlambatan pertumbuhan. Sehingga ketika nilai tukar mengalami apresiasi kegiatan perekonomian masyarakat juga akan meningkat dan kebutuhan dana masyarakat juga akan meningkat. Namun ketika rupiah mengalami depresiasi juga mengakibatkan kebutuhan dana masyarakat meningkat utamanya bagi mereka yang melakukan perdagangan dengan mata uang dolar. Karena rupiah mengalami depresiasi maka kebutuhan danapun juga mengalami peningkatan untuk memenuhi kewajibannya.³⁵

C. Inflasi

Inflasi merupakan sebuah keadaan dimana harga suatu barang mengalami kenaikan. Namun tidak semua keadaan kenaikan harga sebuah barang dapat dikatakan sebagai sebuah inflasi. Sebuah kenaikan harga dapat dikatakan inflasi hanya jika terjadi secara simultan pada semua barang. Seperti jika terjadi kenaikan harga hanya pada cabai namun tidak pada barang lain maka ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah inflasi. Seperti dinyatakan oleh Adiwarman Karim dalam bukunya sebagai berikut:

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa.³⁶

³⁵ Rima Dwijatanti, "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (1), 2017, hal. 1355.

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 135.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang atau jasa secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu. Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang yang beredar. Tingkat inflasi berpengaruh positif maupun negatif tergantung pada derajat inflasi itu sendiri, inflasi yang berlebihan dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan, yaitu dapat membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan.³⁷

1. Jenis-Jenis Inflasi

Ada berbagai cara untuk menggolongkan inflasi. Penggolongan pertama didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut. Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi beberapa macam:³⁸

a. Inflasi Merayap (*creeping inflation*)

Pada jenis ini inflasi biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil. Inflasi ini masih mudah dikendalikan, harga-harga naik secara umum. Walau bagaimanapun inflasi seperti ini sering kali menimbulkan efek yang baik dalam perekonomian.

b. Inflasi Menengah (*galloping inflation*)

Inflasi pada tingkat ini terjadi dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya inflasi *double digit* atau *triple digit*) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang

³⁷ Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya: Erlangga, 2006), hal. 201.

³⁸ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2 Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), hal. 27.

hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil.

c. Inflasi Tinggi (*hyper inflation*)

Merupakan proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Nilai uang semakin merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang.³⁹ Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (akibatnya ditimbulkan adanya perang) yang dibelanjai/ditutupi dengan mencetak uang.

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar. Berdasarkan sebabnya inflasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Inflasi tarikan permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang tinggi pula atas barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebih ini akan menimbulkan inflasi.

Inflasi tarikan permintaan terjadi ketidakstabilan politik yang terus menerus dalam masa ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi

³⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hal. 337.

tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan menyebabkan inflasi.⁴⁰

b. Inflasi dorongan harga (*Cost Push Inflation*)

Disebabkan oleh adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran.

Berdasarkan asalnya inflasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:⁴¹

a. *Domestic inflation* (inflasi yang berasal dari dalam negeri)

Yaitu inflasi yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja Negara yang terlihat pada anggaran belanja Negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musibah (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan dan sebagainya.

b. *Imported inflation* (inflasi yang berasal dari luar negeri)

Karena Negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu Negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa Negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.

⁴⁰ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 314.

⁴¹ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 260.

2. Pengukuran Inflasi

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:⁴²

$$INF = \frac{Tingkat\ Harga_t - Tingkat\ Harga_{t-1}}{Tingkat\ Harga_{t-1}} \times 100\%$$

Kenaikan harga diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:⁴³

a. Indeks biaya hidup (*consumer price indeks*)

Indeks biaya hidup mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup.

1) Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*)

Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga ini sejalan atau searah dengan indeks biaya hidup.

2) GNP (*deflator*)

GNP *deflator* adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan indeks biaya hidup dan indeks harga perdagangan besar diatas dalam cakupan barangnya. GNP *deflator* mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding

⁴² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*...., hal. 136.

⁴³ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*...., hal. 25-26.

dengan dua indeks di atas. *GNP deflator* diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan).⁴⁴

$$GNP\ deflator = \frac{GNP\ nominal}{GNP\ riil} \times 100$$

Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketidakstabilan inflasi akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengganggu kegiatan investasi khususnya.

Masalah inflasi menimbulkan efek atau akibat yang buruk kepada masyarakat. Akibat buruk yang nyata ialah kemerosotan pendapatan riil yang diterima masyarakat. Pendapatan pekerja tidak selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan inflasi. Disamping itu inflasi perlu dihindari karena dapat menimbulkan berbagai akibat buruk ke atas kegiatan dalam perekonomian yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan yang lambat dan pengangguran yang semakin meningkat.⁴⁵

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah inflasi merupakan sebuah keadaan kenaikan harga-harga barang secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu yang disebabkan oleh suatu hal tertentu. Sebuah inflasi dapat disebabkan antara lain oleh efek dari iflasi negara tetangga, atau juga dapat disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap barang dan jasa disuatu negara.

⁴⁴ *Ibid.*...., hal. 25-26.

⁴⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*...., hal. 10

Kejadian-kejadian tersebut dapat berujung pada terjadinya inflasi. Kejadian sebuah inflasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni inflasi rendah atau merayap, menengah dan tinggi.

D. Pembiayaan

Kredit dan pembiayaan memiliki pengertian yang hampir sama. Namun dalam penggunaannya kredit dan pembiayaan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dalam pemberian kredit sering digunakan yang namanya bunga kredit, sedangkan dalam pembiayaan tidak dikenal yang namanya bunga. Islam melarang penggunaan sistem bunga dalam pengambilan keuntungan, sebagai gantinya dalam pengambilan keuntungan digunakan yang namanya bagi hasil, *ujroh*, dan margin. Kedua hal inilah yang membedakan antara kredit dan pembiayaan.

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan dengan memperoleh dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman dana yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau barang. Menurut asal mulanya kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi pemberi kredit maka ia memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk dipinjam uang dan dapat mengembalikannya.⁴⁶

Pembiayaan sering didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Secara luas pembiayaan dapat diartikan sebagai *financing* atau pembelanjaan. *Financing* atau pembelanjaan

⁴⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 72.

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁴⁷

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan pembiayaan sebagai suatu kegiatan penyaluran dana atau tagihan yang berupa pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa-menyewa dengan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Jual beli dengan akad *murabahah*, salam, *istishna'*, serta pinjam-meminjam dengan akad *qard*.⁴⁸

M. Syafi'i Antonio menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan, menurutnya "pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*."⁴⁹ Sedangkan menurut Muhammad "pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga."⁵⁰

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Bank ...*, hal. 17.

⁴⁸ _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah BAB 1 Pasal 1*, (Yogyakarta: Laksana), hal. 14.

⁴⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 160.

⁵⁰ Muhammad, *Op.cit ...*, hal. 17.

mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi-hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudarabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.

Pembiayaan juga dibedakan menurut sifat penggunaannya. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua yakni yang pertama adalah pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kedua yakni pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan produktif masih dibedakan lagi menjadi dua yakni pembiayaan modal kerja yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Jenis yang kedua adalah

pembiayaan investasi yakni untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁵¹

Bank dalam memberikan fasilitas pinjaman baik kredit maupun pembiayaan selalu memiliki sebuah tolak ukur yang sering di kenali dengan prinsip dalam pembiayaan. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C antara lain *character, capacity, capital, collateral, dan conditional*.⁵² Prinsip karakter merupakan prinsip yang menilai watak dari calon debitur suatu bank, penilaian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa calon debitur memiliki sifat atau watak yang dapat dipercaya. Kapasitas yakni penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan. *Capital* atau sering di sebut dengan modal, maksud dari prinsip ini adalah setiap bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada usaha secara sepenuhnya atau penuh. Bank akan melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk usaha yang ingin di biyai oleh bank tersebut. Prinsip yang keempat adalah jaminan, jaminan apa yang diberikan oleh calon debitur untuk menjamin bahwa calon debitur mampu mengembalikan pinjamannya. Jaminan ini dapat berupa jaminan fisik maupun jaminan non fisik. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Prinsip yang terakhir adalah kondisi perekonomian, hal ini berhubungan dengan kelangsungan pembiayaan dan bisnis yang dijalankan oleh calon debitur. Ketika suatu keadaan ekonomi tidak mendukung sektor perekonomian tertentu atau sedang melemah maka bank akan mengurangi pembiayaan di sektor usaha tersebut. Pembiayaan memiliki beberapa unsur yang

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 160.

⁵² Kasmir, *Manajemen Perbankan ...*, hal. 91.

terkandung di dalamnya antara lain kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.⁵³

Dari sini dapat tarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang merupakan bagian dari kegiatan manajemen dana bank syariah. dalam melaksanakan pembiayaan bank syariah menjalankannya secara berhati-hati agar dalam pembiayaan nya dapat berjalan dengan lancar. Dalam prinsip kehati-hatian tersebut bank syariah menerapkan prinsip 5C untuk menilai sebuah nasabah apakah layak untuk diberikan sebuah pembiayaan atau tidak.

E. Manajemen Dana Bank Syariah

Perbankan merupakan lembaga intermediasi bagi masyarakat yang memiliki dana lebih dan yang membutuhkan dana. Bentuk usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dana yang mampu di himpun oleh perbankan nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk produk pembiayaan. Sehingga besaran dana dan besaran pembiayaan yang di keluarkan oleh bank akan berbanding lurus. Ketika dana yang berhasil di himpun oleh bank besar, maka bank dapat melakukan pembiayaan dengan nominal yang besar pula. Begitu pula sebaliknya ketika dana yang di himpun sedikit maka pembiayaan yang di keluarkan sedikit pula. Dalam dunia perbankan penghimpunan dana dari masyarakat tidak hanya dilakukan berdasarkan jumlahnya saja, namun juga di tentukan darimana sumber dana tersebut diperoleh. Sehingga bank mampu mengatur sumberdana tersebut dengan seksama berdasarkan kebutuhan dan jangka waktu yang mungkin

⁵³ *Ibid* ..., hal. 75.

bisa di kelola oleh bank. Semakin maksimal bank dalam mengelola dana yang mereka peroleh semakin tinggi pula keuntungan yang mampu di peroleh oleh perbankan. Pengelolaan dana ini sering diistilahkan sebagai manajemen dana bank. Menurut frianto pandia dalam bukunya ia menyebutkan bahwa:

Manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijaksanaan di bidan usaha pengerahan dana (*source of funds*) pengelolaan dan pengalokasian (*aplication funds*) kedalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat dengan bataran-batasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁵⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatur lalulintas dananya bank harus mampu memenuhi segala kewajibannya. Dalam proses manajemen dana, bank akan memulai dari magatur aktiva yang dimilikinya yakni dimulai ketika dana-dana perbankan relatif murah dan mudah di cari serta tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudia berkembang menjadi manajemen passiva dimana terjadi kelangkaan dana dan dana yang harus dibayar mahal serta terbatas. Dari kedua jenis di atas teori mengenai manajemen dana terus di kembangkan sehingga muncul teori manajemen aktiva-passiva yang muncul akibat adanya gejala tingkat suku bunga di pasar.

Manajemen aktiva dan pasiva yang disebut pula dengan *Assets and Liability Management* (ALMA) sudah dapat dipastikan ada pada setiap bank. Kedua sisi neracayaitu sisi pasiva yang menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan penggunaan (alokasi) dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif serta seoptimal mungkin, karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank. Pengelolaan aset dan liabilitas tersebut disebut juga dengan

⁵⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 4.

Manajemen Aset dan Liabilitas yang dikenal dengan ALMA (*Asset and Liability Management*).⁵⁵ Manajemen aktiva berkaitan dengan upaya bank dalam mengelola atau mengalokasikan dana yang berhasil dihimpun.⁵⁶ Dalam mengatur dananya bank harus mengatur asset dan liabilitasnya yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. *Assets Management*

Asset management (pengelolaan harta) merupakan kegiatan pengalokasian dana ke dalam berbagai kemungkinan investasi. Pertimbangan yang sentral dalam pengelolaan harta ini adalah keseimbangan antara mencari laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat. *Asset management* suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan dana di antara berbagai alternatif investasi. Dalam hubungan dengan bank umum, istilah ini dikaitkan dengan distribusi/ alokasi dana dalam bentuk kas, surat berharga jangka pendek, kredit, aktiva tetap dan aktiva lainnya.

Dana yang diperoleh bank dari masyarakat terikat oleh waktu. Karena itu bank harus dapat memanfaatkan dana yang terikat oleh waktu itu pada investasi yang paling menguntungkan. Bank harus menanamkan dananya pada investasi yang risikonya minim, yang mempunyai tingkat likuiditas relatif tinggi, akan tetapi diharapkan memberikan keuntungan yang optimal.

Dalam menjalankan aktivitas tersebut, bank juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena bank adalah lembaga yang sangat terikat oleh banyak ketentuan. Bank tidak dapat menginvestasikan seluruh dana yang diperolehnya dari masyarakat tetapi harus menahan sebagian demi

⁵⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 534.

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 133.

memenuhi ketentuan yang berlaku seperti likuiditas dan giro wajib minimum (GWM).⁵⁷

Pengelolaan harta bank (*asset management*) merupakan kegiatan yang kompleks yang disebabkan tiga faktor sebagai berikut:

a. Bank Sentral

Bank merupakan lembaga yang paling banyak diatur oleh Bank Indonesia dibandingkan dengan badan usaha/perusahaan/lembaga lainnya. Dana yang diperoleh bank wajib dikelola dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak hanya berpengaruh pada kegiatan operasional namun juga pada aset bank. Beberapa peraturan tersebut antara lain mengenai: *Cash Ratio/ Legal Liquidity*, *Legal Lending Limit (LLL)*, Kredit Usaha Kecil (KUK), *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

b. Penanganan Kredit

Pengelolaan harta bank mencakup pengelolaan dana deposito yang diterima oleh bank dari nasabah, serta mengelola mengenai kredit yang dikeluarkan bank untuk membiayai nasabahnya. Posisi bank disini sangatlah penting mengingat hubungan antara kedua nasabah (debitur dan kreditur) dengan bank sangat penting dan harus memperoleh penanganan tersendiri. Karena posisi bank sebagai lembaga intermediasi antara kedua belah pihak yang memiliki orientasi yang berbeda, debitur menginginkan bunga yang

⁵⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hal. 49.

rendah atas pinjamannya sedangkan kreditur menginginkan bunga yang tinggi atas depositonya.⁵⁸

Apabila pihak bank melakukan penanganan kreditnya dengan benar, maka hal itu akan dapat meningkatkan pendapatan. Untuk itu, pihak bank harus dapat mengelola manajemen asetnya dengan baik agar bisa memberikan imbalan yang tinggi kepada para deposannya sehingga loyalitas deposan tersebut dapat terjaga.

c. Pemegang Saham

Para investor pada bank umum memiliki sifat yang sama seperti para investor lainnya, yaitu mengharapkan pengembalian yang tinggi untuk mengimbangi tingkat risiko yang mungkin dialaminya. Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi dilakukan dengan membebankan bunga yang tinggi kepada para debitur dan menekan pemberian bunga kepada para kreditur. Hal ini tentu sangat sulit bagi bank mengingat bank harus menghadapi persaingan dengan bank lainnya atau lembaga keuangan bukan bank, baik dalam usaha menghimpun maupun menyalurkan dana. Selain menanamkan modal pada bank yang sudah berdiri, biasanya investor juga menanamkan modal terhadap bank yang akan berdiri. Bagi bank yang akan berdiri, modal yang disetor oleh investor sangat penting guna mendukung sisi keuangan bank yang bersangkutan, khususnya pada manajemen asetnya.

2. *Liability Management*

Liability management atau pengelolaan utang bank terhadap pihak ketiga muncul pada saat dana mulai langka dan mahal sebagai dampak semakin

⁵⁸ *Ibid...*, hal. 50.

banyaknya jumlah bank yang beroperasi, sementara dana terbatas. Utang pada bank identik dengan sumber dana bank itu sendiri, karena sebagian besar sumber dana bank berasal atau bersumber dari utang bank terhadap nasabahnya dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bilamana dana dimaksud ditarik atau jatuh tempo. Dengan demikian jelas utang dan pengelolaan utang dalam dunia perbankan memegang peranan yang sangat penting, selain besarnya utang mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat. Harta atau asset bank sebagian besar dibiayai oleh utang. Semakin besar utang bank mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut dan sebaliknya.

Liability management merupakan kegiatan bank dalam menghimpun dan mengelola sumber dana yang memiliki biaya dan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi bank serta memperhatikan faktor persaingan dan sensitivitas sumber dana tersebut.⁵⁹ Dalam arti yang lain, *Liability Management* merupakan pengelolaan sumber dana secara keseluruhan, pengelolaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang disebut *deposit management*, dana yang berasal dari pihak kedua disebut *borrowing*, sedangkan pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri adalah *capital management*.⁶⁰ *Liability Management* disebut juga Manajemen Pasiva pada dasarnya merupakan pengelolaan sumber dana melalui mobilisasi dana.⁶¹

Tugas manajemen liabilitas dalam pengertian yang luas yang dijelaskan oleh Herman, meliputi dua hal yakni:⁶²

⁵⁹ *Ibid...*, hal. 183

⁶⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 571

⁶¹ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding And Liability*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hal. 278

⁶² Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 64.

- a. Mencari dana dari calon deposan dan kreditur. Ini berarti *secara aktif* mencari dana kapan saja diperlukan.
- b. Menentukan komposisi (jenis) dana yang tepat bagi bank yang bersangkutan.

Konsep dasar *liability management* merupakan dasar untuk menjalankan *liability management* itu sendiri. *Liability management* terdiri dari tiga pokok, yaitu:⁶³

- a. Bank berusaha memperkecil biaya dana, dengan memperhatikan faktor persaingan. Misalkan, dana dari masyarakat harus dioptimalkan pengelolaannya untuk dapat memberikan nisbah bagi hasil dengan memperkecil biaya dana, akan tetapi bank juga harus memperhatikan persaingan sehingga masyarakat yang menjadi nasabah tidak berpindah ke bank lain.
- b. Bank berusaha memenuhi komitmen pemberian kredit kepada nasabah-nasabahnya. Misalkan, setiap bulan suatu perbankan harus memberikan kredit kepada nasabah-nasabahnya, di samping itu juga mengelola dana yang ada.
- c. Bank berusaha menghindari dari (tapi tidak melanggar) peraturan-peraturan yang berlaku yang akan menimbulkan beban kepada bank. Misalkan, ketentuan nisbah yang diberikan, akan tetapi tidak dapat memberikan nisbah maka dapat diusahakan.

Untuk ketiga konsep ini harus ada dalam *liability management* karena merupakan konsep dasar dalam menjalankan *liability management*, sehingga konsep dasar ini harus ada.

⁶³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hal. 183

Keempat sumber dana bank yang terdiri dari dana sendiri (*equity*), bantuan likuiditas Bank Indonesia, dana masyarakat dan pasar uang (*money market*) dapat dilihat sensitivitasnya masing-masing. Dana sendiri dan juga bantuan likuiditas Bank Indonesia tidak sensitif terhadap tingkat suku bunga. Apabila dilihat dari biaya riil yang dikeluarkan, bahkan dana sendiri tidak ada biayanya/**tanpa** biaya sama sekali (walaupun dalam perincian tentunya ada biaya, yakni sebesar (*oportunity cost*-nya) sejalan dengan dana sendiri, bantuan likuiditas Bank Indonesia tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga, apa yang telah dijanjikan oleh Bank Indonesia pada waktu menyetujui pertama kalinya bantuan likuiditas (baik jumlah maupun bunganya) tidak akan berubah **sampai** dengan jangka waktunya jatuh tempo, meskipun pada waktu bantuan likuiditas yang dimaksud berjalan terjadi gejolak tingkat bunga yang cukup besar.⁶⁴

Dilain pihak, dana masyarakat (*customer deposits*) dan *purchased funds* merupakan dana yang sensitif (peka) terhadap perubahan tingkat bunga. Apabila terjadi kenaikan tingkat bunga, maka dana yang ditawarkan di pasar uang akan bertambah. Sebaliknya apabila tingkat bunga menurun, yang dibarengi adanya ekspektasi-ekspektasi lain yang lebih menguntungkan, dana yang tersedia di pasar menjadi langka. Dengan demikian jenis dana ini sensitive terhadap perubahan tingkat bunga.

Melihat kepekaan (sensitivitas) dana-dana di atas, maka fungsi *liability management* adalah mengatur bagaimana cara bank mendapatkan dana yang tidak sensitif terhadap bunga sebanyak-banyaknya. Namun tentunya tidak mudah karena kemampuan internal bank untuk mendapatkan tambahan *modal* dan

⁶⁴ *Ibid...*, hal. 184

cadangan-cadangan yang dibentuk dari hasil laba (setelah pajak) sangat terbatas. Untuk meminimumkan biaya dana, bank masih bisa mengusahakan cara lain yaitu meningkatkan aktivitas jasa yang mampu menciptakan sumber penghasilan. Sumber dana dari pemberian jasa ini bukan saja termasuk dana murah bahkan ada yang tidak berbiaya.⁶⁵

Sehingga dapat di simpulkan bahwa kegiatan bank dalam mengatur dana yang diperolehnya meliputi dua hal yakni manajemen asset dan hutang. Dana yang telah diperoleh oleh bank yang sangat sensitif terhadap bunga dan memiliki risiko yang tinggi harus mampu dialokasikan oleh bank dalam investasi yang menguntungkan dengan biaya yang rendah agar keuntungan yang diperolehnya maksimal. Kegiatan bank dalam mengelola dananya tidak dapat lepas dari peraturan-peraturan dari pemerintah, sehingga bank juga harus lebih selektif lagi dalam mengatur dananya. Terutama dana yang berasal dari hutang. Walaupun ketika hutang bank semakin banyak juga mengindikasikan kepercayaan masyarakat, dana ini sangat berisiko dalam pengalokasiannya. Karena dana hutang berasal dari investor dan nasabah, maka timbul kewajiban bagi bank untuk memberikan keuntungan bagi investor dan nasabah. Sehingga loyalitas nasabah dan investor akan dapat dijaga oleh bank.

F. Penelitian Terdahulu

Para akademisi cukup banyak melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyaluran dana berupa pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sangat beragam dari segi variabel penelitian dan juga objek penelitian. Penelitian yang sudah dilakukan antara lain oleh Salma Fathiya Ma'arifa dan

⁶⁵ *Ibid...*, hal. 185

Iwan Budiyo mengenai faktor-faktor pembiayaan murabahah di bank Syariah pada tahun 2015. Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh akademisi yakni oleh Risal Rinofah pada tahun 2015 dan penelitian oleh Rima Dwijayanty pada tahun 2017. Selain ketiga penelitian tersebut ada lagi penelitian yang hampir sama yakni penelitian dari Rahmat Dahlan pada tahun 2014 mengenai pengaruh bonus SBIS dan inflasi terhadap pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. Muhammad Syahbudi dan Ahmad Ripai Saragih juga pernah melakukan penelitian mengenai variabel-variabel makro yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri, penelitiannya dilakukan pada tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Dahlan pada tahun 2015 juga memiliki subjek yang sama dengan judul “Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”.⁶⁶ Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini ialah analisis linear berganda. Variabel penelitian ini ialah tingkat bonus SBIS dan tingkat inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan pada tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia terdapat tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bonus sertifikat bank Indonesia syariah, maka bank syariah akan memiliki kecenderungan untuk mengurangi penyaluran pembiayaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dahlan dengan penelitian saat ini adalah penggunaan variabel inflasi sebagai faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia.

⁶⁶ Rahmat Dahlan, “Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 2 Oktober 2014*, hal. 104.

Sedangkan perbedaannya adalah peneliti saat ini lebih mengembangkan penelitiannya dengan menambah variabel dalam penelitian yakni variabel PDB dan nilai tukar.

Risal Rinofah juga pernah melakukan penelitian yang hampir sama dengan judul “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penyaluran Kredit Umum Dan Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta” pada tahun 2015.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa variabel sebagai tolak ukurnya antara lain PDRB kota Yogyakarta, Nilai Tukar, Inflasi, dan Suku Bunga SBI. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang meneliti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari penelitian ini adalah secara bersama-sama keempat variabel dapat mempengaruhi penyaluran kredit di DI Yogyakarta. Namun secara parsial hanya variabel inflasi yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit di DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan data inflasi yang digunakan merupakan data riil yang terjadi di Yogyakarta, sehingga pengaruhnya lebih terlihat di daerah Yogyakarta. Saat inflasi naik, daya beli masyarakat akan menurun yang berdampak pada tingkat permintaan hasil produksi. Menurunnya permintaan ini akan menyebabkan penurunan produksi sehingga tidak ada kebutuhan dana yang besar kepada dunia perbankan. Persamaan penelitian Risal dengan penelitian saat ini yakni penggunaan variabel nilai tukar sebagai variabel bebas yang dapat mempengaruhi pembiayaan. Sedangkan perbedaannya yakni peneliti saat ini menggunakan variabel PDB dan inflasi nasional agar dapat lebih merepresentasikan pengaruhnya terhadap pembiayaan perbankan syariah secara nasional.

⁶⁷ Risal Rinofah, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penyaluran Kredit Umum Dan Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Sosiohumaniora Volume 1 No 1 April 2015*, hal. 27.

Penelitian lain yang memiliki ranah penelitian yang hampir sama yakni penelitian Salma Fathiya Ma'arifa dan Iwan Budiyo yang meneliti mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia.⁶⁸ Penelitian Salma ini mengambil variabel internal berupa dana pihak ketiga (DPK), sedangkan variabel eksternalnya yakni SBIS, BI Rate, dan Inflasi. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui adanya *research gap* antar penelitian yang pernah ada. Hasil yang ditunjukkan oleh penelitian salma yakni secara simultan variabel-variabel yang di ambil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Namun secara parsial hanya ada dua variabel yang berpengaruh positif yakni variabel dana pihak ketiga dan inflasi, sedangkan variabel SBIS dan BI Rate berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini variabel dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan dana pihak ketiga merupakan sumber yang cukup besar bagi kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Sehingga andil dari dana pihak ketiga dalam penyaluran pembiayaan sangat dominan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penggunaan variabel inflasi sebagai variabel bebas dan juga penggunaan variabel pembiayaan sebagai variabel terikat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saat ini lebih mengembangkan variabel bebas nya dengan menambah PDB dan nilai tukar untuk mengetahui hasil yang lebih mendalam.

⁶⁸ Salma Fathiya Ma'arifa dan Iwan Budiyo, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014", *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5, Nomor 1, Juli 2015*. hal. 12.

Rima Dwijayanti juga pernah melakukan penelitian yang hampir sama dengan judul “Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah” yang dilakukan pada tahun 2017.⁶⁹ Tujuan dari penelitian Rima adalah untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi terhadap permintaan pembiayaan murabahah perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah dengan menggunakan analisis regresi dengan data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Data Statistik Perbankan Indonesia dan Data Statistik Perbankan Syariah periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel makro ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap permintaan pembiayaan murabahah sedangkan secara parsial, variabel inflasi dan nilai tukar valuta asing berpengaruh positif signifikan dan BI Rate berpengaruh negative signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian Rima dan penelitian sekarang yakni penggunaan variabel inflasi dan nilai tukar. Sedangkan perbedaannya peneliti saat ini juga menggunakan variabel PDB sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Selain itu peneliti saat ini juga lebih memperluas cakupan penelitiannya dengan memperluas variabel terikatnya sehingga tidak hanya berfokus pada pembiayaan murabahah saja.

Muhammad Syahbudi dan Ahmad Ripai Saragih meneliti mengenai pengaruh makroekonomi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan

⁶⁹ Rima Dwijayanti, “Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (1), 2017, hal. 1349.

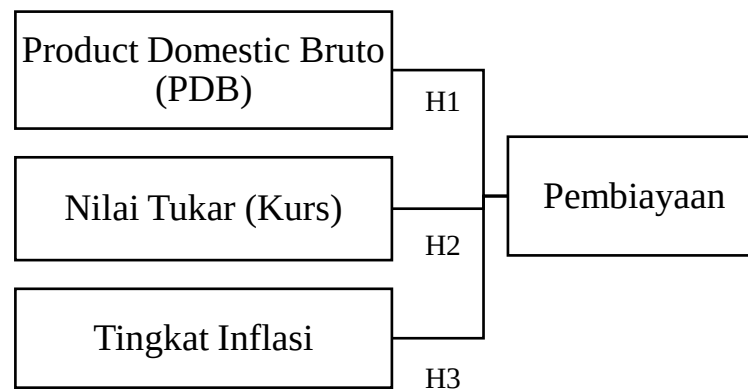
syariah di Indonesia.⁷⁰ Dengan tujuan untuk mengetahui apakah inflasi, BI rate, kurs, serta PDB memiliki pengaruh terhadap pembiayaan maka dilakukanlah penelitian ini pada tahun 2018 di medan. Penelitian Syahbudi ini mengambil rentan penelitian yakni antara tahun 2010 hingga 2016. Penelitian Syahbudi ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas yang meneliti secara kausalitas variabel penelitian sesuai dengan hipotesis. Hasil dari penelitian Syahbudi menunjukkan bahwa tingkat inflasi, suku bunga, dan PDB pada jangka pendek memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat kurs memiliki pengaruh yang negatif terhadap kenaikan pembiayaan Bank Syariah di Indonesia pada jangka pendek, sedangkan pada jangka panjang kurs memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan Bank Syariah. Hal ini karena bila pertumbuhan jumlah mata uang meningkatkan harga barang yang diukur dengan uang, pertumbuhan itu cenderung meningkatkan mata uang asing yang diukur dalam kurs mata uang domestik. Perubahan pergerakan nilai tukar akan sebanding dengan perubahan selisi tingkat inflasi domestik dan asing. apabila nilai tukar rupiah terapresiasi masyarakat akan cenderung berinvestasi di dalam negeri, besarnya investasi di dalam negeri akan memperbanyak penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Persamaan penelitian Syahbudi dengan penelitian saat ini yakni sama-sama menggunakan variabel PDB, Inflasi, dan nilai tukar. Sedangkan perbedaannya peneliti saat ini tidak menggunakan variabel suku bunga karena objek penelitian saat ini yakni Bank Syariah, serta peneliti saat ini menggunakan data yang telah diperbarui sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih terbaru.

⁷⁰Muhammad Syahbudi dan Ahmad Ripai Saragih, "Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Laporan Penelitian Mandiri di Publikasi UIN Sumatra Utara*, 2018. hal, 47.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang pengaruh PDB, tingkat nilai tukar, tingkat inflasi terhadap besarnya pemberian pembiayaan bank yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diagram 2.1
Kerangka Konseptual



a. Pengaruh PDB terhadap pembiayaan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian.⁷¹ Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahbudi dan Ahmad Ripai Saragih yang menunjukkan bahwa perubahan tingkat PDB mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.⁷²

b. Pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan

Nilai tukar dapat diartikan sebagai harga suatu mata uang asing atau harga mata uang luar negeri terhadap mata uang domestik. Pertukaran antara

⁷¹ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal. 224.

⁷² Muhammad Syahbudi dan Ahmad Ripai Saragih, "Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *LPM Prodi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara*, 2018, hal. 45.

mata uang yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs (*exchange rate*).⁷³ Ketika nilai tukar rupiah terapresiasi masyarakat akan cenderung berinvestasi di dalam negeri, besarnya investasi di dalam negeri akan memperbanyak penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rima Dwijatanti yang memberikan hasil bahwa secara parsial nilai tukar memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah.⁷⁴

c. Pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan

Inflasi merupakan kenaikan harga barang yang terjadi secara menyeluruh yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jika kenaikan terjadi hanya pada satu jenis barang maka kenaikan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi.⁷⁵ Semakin tinggi nilai inflasi maka memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dengan asumsi tidak terjadi kenaikan penghasilan. Hasil penelitian yang sama telah dilakukan oleh Risal

⁷³ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 289.

⁷⁴ Rima Dwijatanti, "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (1), 2017, hal. 1355.

⁷⁵ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 135.

Rinofah yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kredit di DIY.⁷⁶

H. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris.⁷⁷ Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

HI : Diduga terdapat pengaruh antara perubahan tingkat PDB terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syariah dan Bank Victoria Syariah.

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh antara perubahan tingkat PDB terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syariah dan Bank Victoria Syariah.

2. Hipotesis 2

HI : Diduga terdapat pengaruh antara perubahan tingkat nilai tukar terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syariah dan Bank Victoria Syariah.

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh antara perubahan tingkat nilai tukar terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syariah dan Bank Victoria Syariah.

3. Hipotesis 3

HI : Diduga terdapat pengaruh antara perubahan tingkat inflasi terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syariah dan Bank Victoria Syariah.

⁷⁶ Risal Rinofah, "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penyaluran Kredit Umum Dan Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Sosiohumaniora Volume 1 No 1 April 2015*, hal. 35.

⁷⁷ Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian Pendekatan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hal. 31.

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh antara perubahan tingkat inflasi terhadap pembiayaan di Bank Central Asia Syariah dan Bank Victoria Syariah.